



LAPORAN CAPAIAN KINERJA

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERTAHANAN NEGARA

TRIWULAN I TAHUN 2021

**Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15
Jakarta Pusat 10110**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat-Nya Kedepatian IV Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Capaian Kinerja periode Triwulan I Tahun 2021.

Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman dan gangguan baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri. Untuk mencapai tujuan tersebut ada tiga sasaran strategis yang saling berkaitan yaitu: terselenggaranya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang pertahanan negara lintas sektoral yang efektif; tercapainya pemenuhan layanan dukungan manajemen yang optimal; dan terselenggaranya pelaksanaan tugas khusus yang optimal.

Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Pertahanan Negara.

Sehubungan dengan pelaksanaan pencapaian kinerja Tahun 2021, sesuai dengan Pasal 18, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara telah menyusun Laporan Capaian Kinerja sebagai pertanggungjawaban selama melaksanakan Sinkronisasi dan Koordinasi terhadap permasalahan-permasalahan di bidang Pertahanan Negara, khususnya dalam mencapai Penetapan Kinerja yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara ini sebagai refleksi dan evaluasi kinerja organisasi selama periode Triwulan I Tahun 2021 agar dijadikan pedoman pelaksanaan kinerja ke depan untuk lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Jakarta, 27 April 2021

Plt. Deputi Bidang Koordinasi
Pertahanan Negara,



Yasid Sulistya, S.Sos, M.Si.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Rangkuman Eksekutif	1
Bab I Pendahuluan	3
A. Latar Belakang	3
B. Tugas dan Fungsi Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara	3
C. Struktur Organisasi Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara	3
Bab III Perjanjian Kinerja	5
A. Perjanjian Kinerja	10
B. Jumlah Anggaran	12
Bab IIII Akuntabilitas Kinerja	13
A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021	13
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2021	14
C. Realisasi Anggaran	23
Bab IV Penutup	25
Lampiran	26

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021, pada Pasal 129 Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Pertahanan Negara.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021, sasaran strategis Deputi IV bidang Koordinasi Pertahanan Negara tahun anggaran 2021 adalah terselenggaranya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang pertahanan negara lintas sektoral yang efektif. Untuk mencapai sasaran strategis ini Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan negara menetapkan 3 Indikator Kinerja yakni :

1. Persentase (%) Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara pada K/L di bawah Koordinasi Kemenko Polhukam Sesuai Dokumen Perencanaan Nasional, dengan target sebesar 85%;
2. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan yang Dapat Mendukung Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara dalam Dokumen Perencanaan Nasional, dengan target 85%; dan
3. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertahanan Negara yang Ditindaklanjuti, dengan target 80%.

Selain itu Sasaran Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara yang kedua adalah Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal yakni dengan empat Indikator Kinerja antara lain :

1. Nilai Sakip, dengan target BB;
2. Nilai PMPRB, dengan target 31;
3. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi, dengan target 80; dan
4. Indeks Kepuasan Palayanan Sekretariat Deputi, dengan target 4.

Evaluasi pelaksanaan kegiatan di atas dapat menjadi acuan bagi pelaksanaan kegiatan rapat, pemantapan koordinasi dan *Focus Group Discussion* (FGD) pada tahun anggaran 2021 khususnya terhadap temuan permasalahan yang menonjol dalam bidang pembangunan *Minimum Essential Forces* (MEF) dan Kontribusi Industri Pertahanan terhadap MEF untuk mengembangkan kekuatan dan kemampuan Alutsista TNI serta permasalahan wilayah perbatasan.

Secara garis besar, capaian kinerja dan perbandingan capaian kinerja Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara hingga Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Laporan Capaian Kinerja
Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara
Triwulan I Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Pertahanan Negara Lintas Sektoral yang Efektif	1. Persentase (%) Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara pada K/L Dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai Dokumen Perencanaan Nasional	85%	-
	2. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan yang Dapat Mendukung Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara dalam Dokumen Perencanaan Nasional.	85%	33,35 %
	3. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertahanan Negara yang Ditindaklanjuti.	80%	-
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	1. Nilai SAKIP	BB	-
	2. Nilai PMPRB	31	-
	3. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	80	-
	4. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi	4	-

Tabel 1. Capaian Kinerja Kedeputan Bidang Koordinasi Pertahanan Negara hingga Tahun 2021

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara periode Triwulan I Tahun 2021 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara. Amanat penyusunan Laporan Kinerja telah ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan bagi setiap Instansi Pemerintah untuk menyusun dokumen perencanaan strategis berupa Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja. Secara teknis, tata cara penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010.

Laporan Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara periode Triwulan I Tahun 2021 memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja dalam mencapai sasaran strategisnya melalui pelaksanaan program dan kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara periode Triwulan I Tahun 2021. Selain wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi, Laporan Capaian Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas kepada publik sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi. Laporan Capaian Kinerja juga bermanfaat sebagai bahan dalam rangka pemantauan, penilaian, evaluasi dan pengendalian atas kualitas kinerja sekaligus menjadi pendorong perbaikan kinerja dalam rangka terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

B. Tugas Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada Pasal 129, Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara yang selanjutnya disingkat dengan Deputi IV/Haneg mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Pertahanan Negara.

Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi IV/Hanegg menyelenggarakan fungsi sebagaimana diatur dalam pasal 130 adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pertahanan negara;
2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pertahanan negara;
3. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pertahanan negara; dan
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

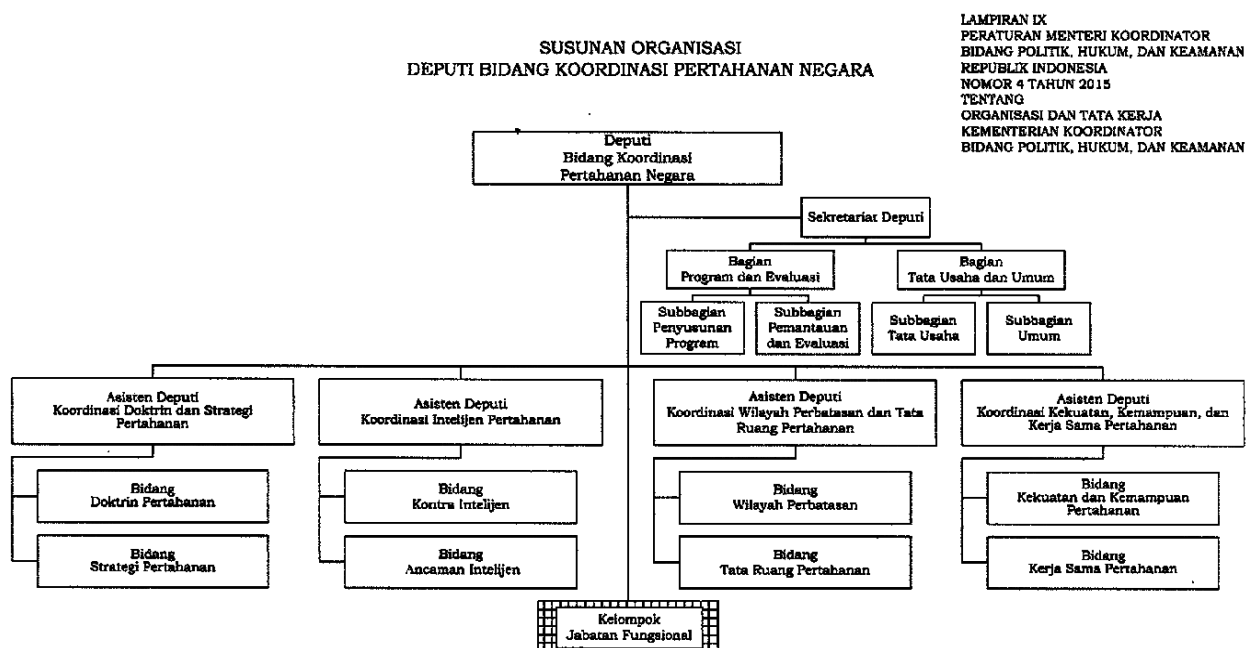
C. Struktur Organisasi

Pada Pasal 131, struktur organisasi Deputi IV/Hanegg terdiri atas :

1. Sekretaris Deputi;
2. Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan;
3. Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Pertahanan;
4. Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan; dan
5. Asisten Deputi Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerjasama Pertahanan.

Bagan Struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara sesuai dengan Permenko Polhukam Nomor 1 Tahun 2021, adalah sebagai berikut :

Gambar I.1. Struktur Organisasi Deputi Bidkooor Pertahanan Negara



LAMPIRAN IX
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Kelembagaan,

ttt.

Drs. Subroto, M.M.

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttt.

LUHUT BINSAR PANDJAITAN

Struktur Organisasi Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara tersebut diperkuat dengan sumber daya manusia (SDM) berjumlah 32 (tiga puluh dua) orang yang melaksanakan dan menjalankan seluruh aktifitas kegiatan dengan komposisi, sebagai berikut:

No.	Jabatan	Eselon	Jumlah
1.	Deputi	Eselon I	1 Orang
2.	Sekretaris Deputi	Eselon II	1 Orang
3.	Asisten Deputi	Eselon II	4 Orang
4.	Kepala Bidang	Eselon III	8 Orang
5.	Kepala Bagian/Perencana Ahli Madya	Eselon III	2 Orang
6.	Kepala Sub Bagian/Jabfung Ahli Muda	Eselon IV	3 Orang
7.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	-	3 Orang
8.	Analisis Politik, Hukum dan Keamanan	-	2 Orang
9.	Pengevaluasi Program dan Kinerja	-	1 Orang
10.	Pengelola Program dan Kegiatan	-	1 Orang
11.	Pengadministrasi Umum	-	3 Orang
12.	PPNPN	-	3 Orang
TOTAL SDM			32 Orang

Tabel I.1. Sumber Daya Manusia (SDM) Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Suatu unit organisasi diharuskan membuat perencanaan agar tidak terjadi ketimpangan manajemen dalam melaksanakan seluruh aktivitas organisasi. Dengan adanya perencanaan yang jelas, maka suatu organisasi dapat mengelola potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan kinerja organisasi.

Rencana suatu organisasi memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, kegiatan, dan indikator kinerja yang diperlukan untuk operasionalisasi kinerja organisasi secara optimal sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara.

A. Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara

1. Visi dan Misi

Pembangunan nasional di bidang politik, hukum, dan keamanan diarahkan agar mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang. Visi Kemenko Polhukam 2020-2024 adalah **“Menjadi Penggerak Utama Sinergitas Lintas Sektoral Penyelesaian Permasalahan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.”**

Sejalan dengan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam yang diselaraskan dengan tingkat capaian pembangunan bidang Pertahanan Negara, maka Kedeputian Bidkooor Pertahanan Negara menetapkan visi: **“Menjadi Penggerak Utama Sinergitas Lintas Sektoral Penyelesaian Permasalahan Bidang Pertahanan Negara.”**

Penggerak Utama merupakan subyek yang memiliki kewenangan untuk memberikan kontribusi paling banyak dalam suatu kegiatan. Penggerak utama disini bukan sebagai sumber kekuatan untuk menghasilkan sesuatu tapi dalam rangka mendorong dan menstimulus berjalannya beberapa kegiatan yang berkaitan.

Sinergitas mengandung makna kegiatan, hubungan, kerjasama unsur atau bagian atau fungsi atau Instansi atau lembaga yang menghasilkan suatu tujuan lebih baik dan lebih besar daripada dikerjakan sendiri. Sinergitas dalam capaian hasil berarti kerjasama berbagai unsur atau bagian atau kelompok atau fungsi atau instansi atau lembaga untuk mendapat capaian hasil yang lebih baik dan lebih besar.

Lintas Sektoral mengandung arti program yang melibatkan suatu institusi atau instansi negeri atau swasta yang membutuhkan pemberdayaan dan kekuatan dasar dari

pemerintah atau swasta mengenai peraturan yang ditetapkan untuk mewujudkan alternatif kebijakan secara terpadu dan Komprehensif sehingga adanya keputusan dan kerja sama.

Guna mewujudkan Visi tersebut, Kedeputian Bidkooor Pertahanan Negara menetapkan Misi yang diharapkan menjadi arah pelaksanaan program dan kegiatan demi terwujudnya Visi yang telah ditetapkan. Misi Kedeputian Bidkooor Pertahanan Negara tahun 2020-2024, yaitu:

- a. Menyusun Rekomendasi Kebijakan bidang Pertahanan Negara yang berkualitas dan dimanfaatkan dengan optimal;
- b. Mengembangkan sistem koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang doktrin dan strategi pertahanan, intelijen pertahanan, wilayah perbatasan dan tata ruang pertahanan serta kekuatan, kemampuan, dan kerjasama pertahanan.
- c. Mewujudkan Reformasi Birokrasi dengan Tata Kelola yang efektif, efisien, dan kredibel pada Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara.

Pencapaian Misi Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dilakukan melalui:

- a. Koordinasi doktrin dan strategi pertahanan;
- b. Koordinasi intelijen pertahanan;
- c. Koordinasi wilayah perbatasan dan tata ruang pertahanan;
- d. Koordinasi kekuatan, kemampuan dan kerjasama pertahanan; serta
- e. Penyelenggaraan penugasan tertentu sesuai arahan dari Menko Polhukam.
- f. Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi, perbaikan *good governance* Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara.

2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

a. Tujuan

Dalam rangka mencapai visi dan misi tersebut, Kedeputian Bidkooor Pertahanan Negara menetapkan tujuan yang diharapkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan selama periode 2021–2024, yaitu:

- 1) Memperkuat stabilitas pertahanan Negara
 - Indikator : Persentase Penyelesaian Permasalahan Bidang doktrin dan strategi pertahanan, intelijen pertahanan, wilayah perbatasan dan tata ruang pertahanan serta kekuatan, kemampuan dan kerjasama pertahanan.
- 2) Kesenambungan reformasi birokrasi, perbaikan governance, dan penguatan kelembagaan.

- Indikator : Indeks pelaksanaan *good governance* Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara.

b. Sasaran dan Indikator Kinerja

Terkait dengan tujuan yang ingin dicapai, Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara menetapkan indikator kinerja utama, sasaran strategi dan indikator kinerja sasaran yang ingin dicapai dalam lima tahun mendatang (2020-2024). Merujuk Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, sasaran strategis Bidang Pertahanan Negara adalah Penguatan Kemampuan Pertahanan dengan Indikator Kinerja Utama yakni Pemenuhan MEF dan Kontribusi Pertahanan. Dalam rangka mencapai tujuan Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara, disusunlah sasaran strategis beserta indikator kinerja sasaran untuk tahun 2020-2024 sebagai berikut :

Tabel III.1 Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Bidang Pertahanan

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran
Memperkuat Stabilitas Bidang Pertahanan Negara	Penyelesaian Permasalahan Bidang Pertahanan Negara	1. Persentase (%) Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara pada K/L Dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai Dokumen Perencanaan Nasional
		2. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan yang Dapat Mendukung Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara dalam Dokumen Perencanaan Nasional.
		3. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertahanan Negara yang Ditindaklanjuti.
	Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen Yang Optimal	1. Nilai SAKIP
		2. Nilai PMPRB
		3. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi
		4. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi
Pelaksanaan Tugas Khusus yang Optimal	Persentase (%) Penyelesaian Tugas Khusus.	

Memperkuat Stabilitas Bidang Doktrin dan Strategi Pertahanan	Penyelesaian Permasalahan Bidang Doktrin dan Strategi Pertahanan Lintas Sektoral yang efektif	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Doktrin dan Strategi Pertahanan
		Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Doktrin dan Strategi Pertahanan
		Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Doktrin dan Strategi Pertahanan yang ditindaklanjuti
Memperkuat Stabilitas Bidang Intelijen Pertahanan	Penyelesaian Permasalahan Bidang Intelijen Pertahanan Lintas Sektoral yang efektif	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Intelijen Pertahanan
		Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Intelijen Pertahanan
		Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Intelijen Pertahanan yang ditindaklanjuti
Memperkuat Stabilitas Bidang Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan	Penyelesaian Permasalahan Bidang Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan Lintas Sektoral yang efektif	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan
		Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan
		Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan yang ditindaklanjuti
Laporan Desk Wilayah Perbatasan dan PPKT	Penyelesaian Permasalahan Wilayah Perbatasan dan PPKT yang Optimal	Jumlah Laporan Desk Wilayah Perbatasan dan PPKT
		Jumlah Laporan Desk Wilayah Perbatasan dan PPKT yang ditindaklanjuti Menko Polhukam.
Memperkuat Stabilitas Bidang Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan	Penyelesaian Permasalahan Bidang Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan Lintas Sektoral yang efektif	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan
		Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan
		Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan yang ditindaklanjuti

Strategi untuk pencapaian sasaran pembangunan bidang polhukam dilaksanakan melalui implementasi program dan kegiatan dengan berpedoman kepada konsep restrukturisasi program dan kegiatan.

Sasaran dan Indikator Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara merupakan implementasi dan aktualisasi dari program prioritas dan kegiatan Kemenko Polhukam untuk jangka waktu lima tahun (2021–2024).

B. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Tahun 2021

Rencana Kinerja Tahunan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, dan berorientasi hasil. Selanjutnya penetapan kinerja disusun sebagai komitmen dari rencana kinerja tahunan yang harus dicapai oleh instansi pemerintah dalam rangka meningkatkan efektivitas, akuntabilitas instansi pemerintah.

Kemenko Polhukam telah menetapkan indikator dan target kinerja yang digunakan sebagai acuan dalam pengukuran kinerja. Dalam rangka mewujudkan manajemen kinerja yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi hasil (*outcome*), maka Kedeputian IV/Bidkooor Hanneg menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebagai pernyataan perjanjian kinerja antara Pemberi Amanat (Menko Polhukam) dengan Penerima Amanat (Deputi Bidkord Hanneg). Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Berkomitmen dengan tekad dan janji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang jelas dan terukur dengan menetapkan sasaran strategis dan IK (Indikator Kinerja) yaitu hal-hal utama yang akan diwujudkan oleh Kedeputian IV/Bidkooor Hanneg sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya. Berikut sasaran strategis dan IK Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara beserta dengan nilai targetnya :

Tabel III. 2. Perjanjian Kinerja Deputi IV/Bidkooor Hanneq TA 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Pertahanan Negara Lintas Sektoral yang Efektif	1. Persentase (%) Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara pada K/L Dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai Dokumen Perencanaan Nasional	85%
	2. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan yang Dapat Mendukung Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara dalam Dokumen Perencanaan Nasional.	85%
	3. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertahanan Negara yang Ditindaklanjuti.	80%
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	1. Nilai SAKIP	BB
	2. Nilai PMPRB	31
	3. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	80
	4. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi	4

Dari tabel tersebut, Deputi IV/Bidkooor Hanneq di tahun 2021 ini mempunyai beberapa sasaran strategis dengan indikator kerjanya, yaitu :

1. Sasaran strategis terselenggaranya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang pertahanan negara lintas sektoral yang efektif, dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:
 - a. Persentase (%) Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara pada K/L Dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam Sesuai Dokumen Perencanaan Nasional, dengan target sebesar 85%;
 - b. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan yang Dapat Mendukung Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara dalam Dokumen Perencanaan Nasional, dengan target 85%; dan
 - c. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertahanan Negara yang Ditindaklanjuti, dengan target 80%.

2. Sasaran Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara yang kedua adalah Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal yakni dengan 3 Indikator Kinerja antara lain:
 - a. Nilai Sakip, dengan target BB;
 - b. Nilai PMPRB, dengan target 31;
 - c. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi, dengan target 80; dan
 - d. Indeks Kepuasan Palayanan Sekretariat Deputi, dengan target 4.

C. Jumlah Anggaran

Jumlah Pagu Anggaran Program dan Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara untuk tahun 2021 setelah Refocussing Anggaran adalah sebesar Rp.10.864.427.000,- (Sepuluh Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021

Capaian kinerja merupakan dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan melalui pengukuran kinerja, yaitu dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja pada setiap sasaran kinerja yang akan diukur. Secara garis besar, capaian kinerja Kedeputian IV/Bidang Koordinasi Pertahanan Negara pada periode Triwulan I Tahun 2021 dapat dilihat pada Indikator Kinerja Utama dengan penjelasan pada tabel berikut:

Tabel III. 1. Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Deputi Bidkooor Pertahanan Negara periode Triwulan I Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Pertahanan Negara Lintas Sektoral yang Efektif	1. Persentase (%) Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara pada K/L Dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai Dokumen Perencanaan Nasional	85%	-
	2. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan yang Dapat Mendukung Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara dalam Dokumen Perencanaan Nasional.	85%	33,35 %
	3. Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertahanan Negara yang Ditindaklanjuti.	80%	-
Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal	1. Nilai SAKIP	BB	-
	2. Nilai PMPRB	31	-
	3. Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi	80	-
	4. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi	4	-

B. Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja periode Triwulan I Tahun 2021

Pelaksanaan evaluasi dan analisis atas pencapaian kinerja Kedeputian IV/Bidkooor Hanneg dapat dijelaskan dengan pengungkapan setiap sasaran strategis beserta IK-nya sebagai tolok ukur.

1. Sasaran Strategis Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Bidang Pertahanan Negara Lintas Sektoral yang Efektif

- a. **Indikator Kinerja 1.1:** Persentase (%) Capaian Target Pembangunan Bidang Pertahanan Negara pada K/L Dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai Dokumen Perencanaan Nasional.

Persentase (%) capaian target pembangunan bidang pertahanan negara adalah rata-rata persentase capaian MEF dan persentase capaian Industri Pertahanan.

a) **Kekuatan Pokok Minimum TNI (Minimum Essential Force/MEF)**

Kekuatan Pokok Minimum TNI (Minimum Essential Force/MEF) adalah suatu standar kekuatan pokok dan minimum, yang merupakan bagian dari postur TNI secara utuh, dan mutlak untuk disiapkan sebagai prasyarat utama serta mendasar bagi terlaksananya secara efektif tugas pokok dan fungsi TNI dalam menghadapi ancaman aktual serta tercapainya efek tangkal yang tinggi.

b) **Industri Pertahanan**

Industri Pertahanan adalah sebagian dari tatanan industri nasional yang secara khusus memiliki kemampuan ataupun potensi yang dapat maupun dikembangkan untuk menghasilkan produk berupa sistem senjata, peralatan dan perlengkapan, dukungan administrasi/logistik ataupun jasa-jasa bagi kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara. Permasalahan yang dihadapi diantaranya pada keterbatasan dalam penguasaan teknologi kunci dan/ atau kemampuan integrasi sistem. Dua hal tersebut, merupakan syarat agar industri pertahanan dapat meningkatkan kontribusi bagi pemenuhan alutsista TNI sekaligus memiliki daya saing internasional guna menjadi bagian dari *global supply chain*.

Sumber nilai capaian indikator ini berasal dari Laporan Pencapaian MEF Kementerian Pertahanan dan Laporan Pencapaian Industri Pertahanan Kementerian Pertahanan. Berikut ini adalah cara menghitung Persentase (%) capaian target pembangunan bidang Pertahanan Negara pada K/L dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam sesuai dokumen perencanaan nasional:

1) Persentase Capaian MEF

$$\Sigma = \frac{\text{Capaian MEF}}{\text{Target MEF pada Dokumen Perencanaan Nasional}} \times 100\%$$

2) Persentase Capaian Industri Pertahanan

$$\Sigma = \frac{\text{Capaian Industri Pertahanan}}{\text{Target Industri Pertahanan pada Dok Perencanaan Nasional}} \times 100\%$$

3) Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Hanneg

$$\Sigma = \frac{\text{Persentase Capaian MEF} + \text{Persentase Capaian Industri Pertahanan}}{2}$$

Hingga tanggal 31 Maret 2021 belum ada data terbaru terkait data capaian MEF dan capaian Industri Pertahanan dari Kementerian Pertahanan pada periode Triwulan I Tahun 2021.

- b. **Indikator Kinerja 1.2** : Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang pertahanan negara dalam dokumen perencanaan nasional.

Mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan, dapat mendukung terhadap tercapainya pembangunan bidang pertahanan negara yang tertuang dalam dokumen perencanaan nasional. Data yang digunakan adalah hasil rata-rata capaian persentase rekomendasi kebijakan dari masing-masing keasdepan di Kedeputan Bidkooor Hanneg yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang pertahanan negara dalam dokumen perencanaan nasional. Berikut ini adalah cara menghitung Persentase (%) rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung capaian target pembangunan bidang pertahanan negara dalam dokumen perencanaan nasional, sebagai berikut:

$$\Sigma = \mu \% \text{ Capaian Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertahanan Negara sesuai Dokumen Perencanaan Nasional}$$

Keterangan: μ : rata-rata

Hingga akhir periode Triwulan I pada tanggal 31 Maret 2021, capaian rekomendasi yang sudah dihasilkan oleh keasdepan di bawah Kedeputan IV Bidkor Pertahanan Negara yang sesuai dengan Dokumen Perencanaan Nasional adalah sebagai berikut :

Unit Eselon II	Realisasi rekomendasi	Realisasi Rekomendasi Sesuai Dokumen Perencanaan Nasional	% Rekomendasi yang Sesuai Dokumen Perencanaan Nasional
Asdep 1	-	-	-
Asdep 2	3	1	33,35%
Asdep 3	-	-	-
Asdep 4	-	-	-
Total	3	1	33,35%

Tabel III.1 Rata-rata Capaian Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertahanan Negara sesuai Dokumen Perencanaan Nasional

- c. Indikator Kinerja 1.3: Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang pertahanan negara yang ditindaklanjuti.

Mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan, dapat berpengaruh terhadap tercapainya pembangunan bidang pertahanan negara yang tertuang dalam dokumen perencanaan nasional. Hal ini diperlukan agar Kemenko Polhukam dapat melakukan monitoring dan follow up atas rekomendasi yang dihasilkan dan untuk memastikan bahwa rekomendasi ditindaklanjuti oleh K/L terkait.

Sumber data dari indikator ini adalah Rata-rata capaian persentase rekomendasi kebijakan dari masing-masing keasdepan di Kedeputan Bidang Koordinasi Pertahanan Negara yang ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga terkait. Berikut ini adalah cara menghitung Persentase (%) rekomendasi kebijakan bidang pertahanan negara yang ditindaklanjuti:

$$\Sigma = \mu \% \text{ Capaian Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertahanan Negara yang Ditindaklanjuti}$$

Keterangan: μ : rata-rata

Hingga tanggal 31 Maret 2021 belum ada tindaklanjut dari rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Kedeputan Bidkor Pertahanan Negara yang sudah dikirimkan kepada Kementerian/Lembaga terkait pada periode Triwulan I Tahun 2021.

2. Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen yang Optimal

a. Indikator Kinerja 2.1: Nilai SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian yang sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengiktisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan Kinerja instansi Pemerintah. Komponen Penilaian Evaluasi SAKIP Unit Kerja Eselon I yaitu:

- 1) Perencanaan Kinerja;
- 2) Pengukuran Kinerja;
- 3) Pelaporan Kinerja;
- 4) Evaluasi Internal; dan
- 5) Capaian Kinerja.

Nilai SAKIP berasal dari hasil penilaian Inspektorat Kemenko Polhukam. Berikut ini adalah kategori penilaian hasil evaluasi SAKIP unit kerja eselon I: 1. AA (>90-100); 2. A (>80-90); 3. BB (>70-80); 4. B (>60-70); 5. CC (>50-60); 6. C (>30-50); dan 7. D (0-30).

Hingga tanggal 31 Maret 2021 Inspektorat belum melaksanakan reviu atau audit terhadap pelaksanaan SAKIP di Kedeputian IV Bidkor Pertahanan Negara pada periode Triwulan I Tahun 2021. Namun demikian, upaya-upaya yang dilakukan dalam peningkatan SAKIP, yaitu telah disusunnya :

- 1) Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Es I-staf Kedeputian Bidkooor Hanneg;
- 2) Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2021 Kedeputian Bidkooor Hanneg;
- 3) Laporan Kinerja Kedeputian Bidkooor Hanneg Tahun 2020;
- 4) Melaksanakan Monev Triwulan IV tahun 2020.

b. Indikator Kinerja 2.2: Nilai PMPRB

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dengan Penilaian terhadap setiap program dalam komponen pengungkit (Proses), yaitu:

- a) Manajemen Perubahan;
- b) Penataan Peraturan Perundang-undangan;

- c) Penataan dan Penguatan Organisasi;
- d) Penataan Tatalaksana;
- e) Penguatan Pengawasan;
- f) Penatan Sistem Manajemen SDM;
- g) Penguatan AKuntabilitas Kinerja; dan
- h) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Indeks Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi mengukur pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan organisasi terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business proses) dan sumber daya manusia aparatur. Skala nilai 0 – 23,5. PMPRB dilakukan dengan cara penilaian mandiri masing-masing kedeputian.

Hingga tanggal 31 Maret 2021 Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi belum dilaksanakan oleh Kedeputian IV Bidkor Pertahanan Negara pada periode Triwulan I Tahun 2021. Namun demikian, dalam rangka mendorong implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi IV/Bidkoo Hanneg, telah ditetapkan Surat Perintah Tim Reformasi Birokrasi Deputi IV/Bidkoo Hanneg Nomor 29/OT.03/2/2020 tanggal 7 Februari 2020.

c. Indikator Kinerja 2.3: Indeks Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi

Perencanaan kinerja merupakan proses dimana seluruh pegawai dimasing-masing unit untuk merencanakan apa yang harus dilakukan dalam satu tahun kedepan. Penilaian yang dikeluarkan oleh bagian perencanaan dan evaluasi atas penilaian perencanaan serta evaluasi unit kerja. Indeks penilaian yang dikeluarkan oleh bagian perencanaan dan evaluasi atas penilaian perencanaan serta evaluasi unit kerja dengan skala 1-100 terbagi menjadi dua unsur penilaian yaitu 50 poin untuk unsur perencanaan dan 50 poin untuk unsur evaluasi dan pelaporan.

Hingga tanggal 31 Maret 2021 penilaian Kualitas Perencanaan Kinerja dan Anggaran Deputi belum dilaksanakan oleh Biro Perencanaan pada periode Triwulan I Tahun 2021.

d. Indikator Kinerja 2.4: Indeks kepuasan pelayanan Sekretariat Deputi

Kualitas pelayanan ini dapat diartikan sebagai tingkat kepuasan tamu atau konsumen. Sedangkan tingkat kepuasan tamu ini sendiri dapat diperoleh dari perbandingan atas jenis pelayanan yang nyata diterima oleh konsumen dengan jenis pelayanan yang diharapkan oleh konsumen. Dilakukan dengan cara melakukan survey kepuasan pelayanan Sekretariat Deputi Bidkoo Hanneg dari *stakeholders*.

$$\Sigma = \frac{\text{Indeks pelayanan ProgEv} + \text{Indeks Pelayanan Umum}}{2}$$

Hingga tanggal 31 Maret 2021 penilaian Kepuasan Pelayanan Sekretariat Deputi belum dilaksanakan pada periode Triwulan I Tahun 2021. Penilaian indeks ini dilaksanakan pada akhir tahun. Namun demikian, upaya untuk peningkatan Penilaian Indeks kepuasan pelayanan Sekretariat Deputi IV/Bidkooor Hanneg dilakukan dengan melaksanakan :

- 1) Mengisi SKP Tahun 2020;
- 2) Mengisi LHKPN/LHKSN Tahun 2020;
- 3) Mengisi LHKPN/LHKSN Tahun 2021; dan
- 4) Memberikan layanan tata usaha dan umum.

C. Realisasi Anggaran

Berdasarkan data keuangan dari Pejabat Pemegang Komitmen (PPK), realisasi penggunaan anggaran Kedeputian IV/Bidkooor Hanneg pada tahun 2021 dari Pagu sebesar Rp.10.864.427.000,- (Sepuluh Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dapat direalisasikan atau terlaksana penyerapan sebanyak Rp.1.453.323.109 (Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Seratus Sembilan Rupiah), atau sebesar 13,38 %.

Tabel III.3 Realisasi Anggaran Kedeputian Bidkooor Hanneg Triwulan I Tahun 2021

Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi TW I (Rp)	Sisa Pagu (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6
4554.ABE.001	Koord. Doktrin dan Strategi Pertahanan	950.000.000	134,589,518	815,410,482	14.17%
4554.ABE.002 4554.ABE.006 4554.ABE.007	Koord. Intelijen Pertahanan	2.496.155.000	218,302,417	2,277,852,583	8.75%
4554.ABE.003 4554.ABE.005 4554.ABE.008	Koord. Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan	4.422.770.000	826.836.532	3.595.933.468	18,69%
4554.ABE.004	Koord. Kekuatan, Kemampuan dan Kerja Sama Pertahanan	2.079.192.000	193.465.108	1.885.726.892	9,30%
4554.EAC.001 4554.EAC.002	Sekretariat Deputi Koordinasi Pertahanan Negara	916.310.000	80.129.534	836.180.466	8,74%
4554	TOTAL KEDEPUTIAN IV =	10.864.427.000	1.453.323.109	9.411.103.891	13,38%

BAB IV

PENUTUP

Laporan Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara periode Triwulan I Tahun 2021 disusun untuk mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi amanah dan sebagai bentuk wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta media untuk menginformasikan capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara periode Triwulan I Tahun Anggaran 2021. Laporan Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara periode Triwulan I Tahun 2021 ini diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya tatakelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pelaporan kinerja ini menjadi media evaluasi, sekaligus menjadi instrumen untuk melakukan perbaikan yang tepat dan berkesinambungan.

Secara umum, kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara periode Triwulan I Tahun 2021 dalam mencapai sasaran strategis Tahun 2021 belum memuaskan, dikarenakan belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja periode Triwulan I Tahun 2021. Namun demikian, pelaksanaan pencapaian kinerja terus dilakukan dengan dukungan, kerjasama dan partisipasi semua pihak, baik internal Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara maupun pihak eksternal (*stakeholder*).



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN**

LAMPIRAN

**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**NOTA DINAS
Nomor B- 219 /EP.02.01/4/2021**

Yth. : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
D a r i : Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara
Hal : Penyampaian LAKIP Eselon I Triwulan I Tahun 2021
Tanggal: 27 April 2021

Merujuk Program Kerja Tahun 2021, Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dengan ini menyampaikan Laporan Capaian Kinerja (Lakin) Eselon I sebagai Pertanggungjawaban Kinerja Triwulan I pada Tahun 2021.

Demikian disampaikan, mohon menjadi periksa.



Yasid Sulistya, S.Sos, M.Si.

Tembusan:

1. Biro Perencanaan dan Organisasi;
2. Inspektur Kemenko Polhukam.